



UPTD PUSKESMAS  
SIDOMULYO

**USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO**

No. Revisi : 00

Mulai Berlaku : 01 Januari 2025

Halaman 1 dari 1



Eka Akhmad Nuryani, SKM.,M.Si  
NIP 197412161998031003

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU Pengecualian	AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Toilet wanita tidak dapat digunakan karna saluran pipa merembes	Pengaduan Masyarakat: 1. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a 2. Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/200 8 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 3. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit	1. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak 2. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih. 3. Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran	1. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan 2. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong	Telah membuat laporan terkait pengaduan yang masuk dan telah memasang di Papan Pengumuman terkait jawaban pengaduan tersebut

	2. Dokumen pengaduan masyarakat	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	terciptanya WBK dan WBBM 3. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan.		
2	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan	1. Dapat menimbulkan stimulasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat 2. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	1. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) diterima DPRD 2. Sampai dengan terbitnya hasil audit

3	Dokumen dan Berkas Pengawasan	Dokumen dan Berkas Pengawasan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j 2. UU NO. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya masa pengawasan.
4	Data Elektronik Pegawai	Bio Data Elektronik PNS (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Dokumen Pegawai	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Akun Akses Elektronik	Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password semua aplikasi yang tersedia di Puskesmas	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE ( Pasal 1 angka 16 )	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
7	Sistem Keamanan Elektronik	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Akses

